

## **PERAN BPJS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI DI BPJS KARIMUNJAWA**

**Wafiula Mumtaz<sup>1</sup>, Nuruni Ika Kusuma Wardhani<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur<sup>1,2</sup>

e-mail: [23012010124@student.upnjatim.ac.id](mailto:23012010124@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [ikanuruni.mnj.@upnjatim.ac.id](mailto:ikanuruni.mnj.@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

Diterima: 31/12/2025; Direvisi: 6/1/2026; Diterbitkan: 20/1/2026

### **ABSTRAK**

Risiko kecelakaan kerja yang tinggi pada sektor jasa konstruksi menuntut adanya perlindungan sosial ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi pekerja proyek yang memiliki karakteristik kerja berisiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program JKK dan JKM pada perusahaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya, dengan menitikberatkan pada pola kolaborasi, strategi sosialisasi, serta hambatan implementasi di tingkat operasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang terdiri atas petugas BPJS Ketenagakerjaan dan pengelola proyek jasa konstruksi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program JKK dan JKM secara umum telah berjalan cukup efektif, terutama melalui kerja sama lintas lembaga dan strategi sosialisasi terpadu. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman perusahaan, keterlambatan pendaftaran pekerja proyek, serta hambatan administratif dalam proses klaim. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan sinergi antarlembaga, komunikasi kebijakan yang efektif, dan inovasi layanan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan perlindungan pekerja sektor jasa konstruksi.

**Kata Kunci:** *BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Konstruksi, Implementasi Program*

### **ABSTRACT**

The high risk of workplace accidents in the construction services sector requires adaptive and sustainable social protection for workers. The Work Accident Insurance (JKK) and Death Insurance (JKM) programmes organised by BPJS Ketenagakerjaan - an play an important role in providing protection for project workers who have risky job characteristics. This study aims to examine the role of BPJS Ketenagakerjaan in implementing the JKK and JKM programmes at construction service companies in BPJS Ketenagakerjaan Karimunjawa Surabaya, with a focus on collaboration patterns, socialisation strategies, and implementation barriers at the operational level. The study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with ten informants consisting of BPJS Ketenagakerjaan officers and construction service project managers, then analysed thematically. The results of the study indicate that the implementation of the JKK and JKM programmes has generally been quite effective, particularly through inter-agency cooperation and integrated socialisation strategies. However, there are still obstacles in the form of low understanding among companies, delays in registering project workers, and administrative barriers in the claims process. The study concludes that strengthening inter-agency synergy, effective policy

communication, and service innovation are key factors in improving the protection of workers in the construction services sector.

**Keywords:** Employment Social Security Agency, construction services, programme implementation

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur fisik di Indonesia memegang peranan yang sangat vital dan strategis sebagai tulang punggung utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi serta mobilitas nasional. Sektor konstruksi berfungsi sebagai motor penggerak dalam penyediaan berbagai fasilitas publik esensial, mulai dari jaringan jalan raya, jembatan penghubung, gedung-gedung bertingkat, pelabuhan, hingga fasilitas sosial lainnya yang menunjang kesejahteraan masyarakat luas. Namun, di balik kontribusi masifnya terhadap pembangunan negara, sektor ini menyimpan potensi bahaya yang sangat tinggi dan menuntut kewaspadaan ekstra terkait aspek keselamatan serta kesehatan kerja. Berbagai data nasional secara konsisten menempatkan industri konstruksi pada posisi teratas sebagai sektor dengan tingkat kerawanan kecelakaan paling tinggi dibandingkan industri lainnya. Ancaman ini bersumber dari lingkungan kerja yang dinamis dan berbahaya, interaksi intensif dengan alat-alat berat, hingga kompleksitas teknis pekerjaan di lapangan. Laporan terbaru dari kementerian terkait menunjukkan adanya tren kenaikan insiden kecelakaan kerja yang signifikan pada awal tahun 2025, yang mengindikasikan perlunya perbaikan mendasar dalam penerapan manajemen risiko guna melindungi para pekerja dari dampak fatal (Hanafi et al., 2025; Mayansara et al., 2025; Yogama et al., 2022).

Hingga periode April 2025, statistik mencatat angka yang cukup mengkhawatirkan dengan puluhan ribu insiden kecelakaan kerja yang terjadi di berbagai lini industri. Dari totalitas insiden tersebut, sektor jasa konstruksi mendominasi sebagai penyumbang terbesar angka kecelakaan, dengan persentase mencapai hampir sepertiga dari seluruh kasus yang dilaporkan secara nasional. Fakta empiris ini menegaskan bahwa para pekerja di sektor konstruksi masih berhadapan dengan tingkat risiko operasional yang ekstrem dan memerlukan attensi serius dalam penerapan standar keselamatan kerja yang ketat. Tingginya angka kecelakaan ini menuntut hadirnya sebuah sistem perlindungan sosial yang kokoh dan komprehensif. Perlindungan sosial bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan segala upaya terencana yang dilakukan oleh negara untuk mencegah dan menangani risiko guncangan ekonomi serta kerentanan sosial. Tujuannya adalah untuk mendukung masyarakat agar tetap mandiri dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar manusia mereka, terutama ketika terjadi musibah yang tidak diinginkan di tempat kerja yang berisiko tinggi tersebut (Puspitasari et al., 2022; Suwandi & Wardana, 2022).

Di Indonesia, tanggung jawab negara dalam memberikan payung perlindungan ini dimanifestasikan melalui keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang beroperasi secara sistemik. Lembaga ini bertugas memberikan jaring pengaman bagi masyarakat melalui dua skema utama, yaitu jaminan sosial di bidang kesehatan dan jaminan sosial khusus untuk tenaga kerja. Sementara aspek kesehatan ditangani oleh entitas tersendiri, perlindungan bagi pekerja dikelola secara spesifik melalui BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini mengelola berbagai program krusial yang dirancang untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko kehidupan, mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Keberadaan program-program ini sangat esensial untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja memiliki sandaran finansial dan kepastian masa depan, sehingga mereka dapat bekerja dengan

tenang tanpa dihantui kecemasan berlebih akan risiko sosial ekonomi yang mungkin menimpa mereka dan keluarganya akibat aktivitas pekerjaan (Anggreni et al., 2024; Izzyati et al., 2023; Zubair & Yassir, 2025).

Secara spesifik, tenaga kerja yang berkecimpung di industri konstruksi mendapatkan perhatian khusus melalui skema Jaminan Jasa Konstruksi atau yang dikenal dengan istilah *Jakon*. Program ini dirancang sebagai instrumen perlindungan wajib yang mengharuskan setiap perusahaan atau penyedia jasa konstruksi untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerja proyek mereka guna mendapatkan manfaat perlindungan JKK dan JKM selama durasi proyek berlangsung. Mengacu pada regulasi pemerintah yang berlaku, setiap proyek fisik diwajibkan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ini bahkan sebelum pelaksanaan proyek dimulai. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan inklusivitas perlindungan, di mana semua pekerja, baik yang berstatus pegawai tetap, pekerja harian lepas, maupun buruh borongan, mendapatkan hak proteksi yang setara dari risiko kecelakaan dan kematian. Hal ini merupakan bentuk kehadiran negara (*das sollen*) dalam menjamin keselamatan setiap individu yang terlibat dalam pembangunan, memastikan tidak ada pekerja yang terabaikan haknya dalam ekosistem kerja yang berisiko tinggi (Anggriawan, 2020; Sutrisno, 2020; Suwandi & Wardana, 2022).

Meskipun kerangka regulasi telah disusun dengan rapi, realitas implementasi di lapangan (*das sein*) masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang pelik. Banyak perusahaan konstruksi, terutama yang berskala kecil dan menengah, teridentifikasi belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pendaftaran pekerjanya ke dalam program perlindungan sosial tersebut. Berbagai alasan klasik sering kali menjadi hambatan utama, mulai dari persepsi bahwa sistem administrasi pendaftaran dinilai terlalu rumit dan memakan waktu, hingga anggapan bahwa biaya iuran merupakan beban operasional tambahan yang memberatkan keuangan proyek. Selain itu, kurangnya intensitas sosialisasi dari pihak penyelenggara menyebabkan pemahaman para pelaku usaha konstruksi di level bawah masih sangat minim. Akibatnya, masih banyak tenaga kerja proyek yang rentan, bekerja di bawah bayang-bayang risiko tinggi tanpa perlindungan sosial yang memadai, sehingga ketika terjadi kecelakaan, mereka sering kali tidak mendapatkan kompensasi atau perawatan medis yang seharusnya menjadi hak mereka (Pratiwi & Triwahyudi, 2020; Silaban et al., 2023).

Kesenjangan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor kepatuhan perusahaan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran atau *awareness* dari para pemangku kepentingan mengenai urgensi program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman pemberi kerja terhadap pentingnya jaminan sosial sebagai investasi keselamatan masih sangat minim. Ironisnya, mayoritas pekerja proyek sendiri juga sering kali tidak menyadari manfaat krusial dari partisipasi dalam program ini, bahkan tidak mengetahui hak-hak apa saja yang mereka miliki jika terjadi insiden di lokasi kerja. Situasi ketidaktahuan ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara regulasi ideal yang telah ditetapkan pemerintah dengan praktik nyata di lapangan. Absennya budaya keselamatan dan jaminan sosial yang kuat mengakibatkan implementasi program sering kali hanya bersifat formalitas administratif belaka tanpa menyentuh esensi perlindungan yang sesungguhnya bagi para pekerja rentan.

Berdasarkan dinamika permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki nilai urgensi dan kebaruan yang signifikan untuk dilakukan. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis kontribusi nyata jaminan jasa konstruksi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan bagi pekerja proyek. Secara khusus, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai rintangan operasional serta mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Karimunjawa Surabaya dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan di sektor konstruksi. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana fungsi jaminan sosial dijalankan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab moral perusahaan. Hasil dari kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi perumusan kebijakan dan inovasi pelayanan di masa depan, sehingga kesadaran dan partisipasi pekerja konstruksi dapat ditingkatkan, serta tujuan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja Indonesia dapat terwujud secara optimal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menyelidiki secara mendalam peran BPJS Ketenagakerjaan dalam implementasi program JKK dan JKM. Fokus utama studi ini adalah memahami fenomena sosial dalam konteks alamiahnya, yakni realitas perlindungan tenaga kerja di sektor jasa konstruksi, tanpa melakukan intervensi atau eksperimen terhadap subjek penelitian. Pemilihan metode ini didasari oleh kebutuhan untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan dinamika interaksi antara aktor yang terlibat, serta menggambarkan kondisi faktual implementasi kebijakan di lapangan secara komprehensif. Subjek penelitian terdiri dari informan kunci yang dipilih secara purposive, mencakup petugas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karimunjawa dan perwakilan pengelola proyek konstruksi, yang dianggap memiliki wawasan otoritatif mengenai mekanisme operasional jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam *in-depth interview* sebagai instrumen utama untuk menggali informasi substansial dari para informan. Melalui interaksi dialogis ini, peneliti berupaya menangkap perspektif subjektif partisipan mengenai efektivitas sosialisasi, kendala administratif, serta manfaat nyata program perlindungan yang dirasakan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan data primer yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai prosedur kerja, pola kolaborasi lintas lembaga, serta hambatan riil yang dihadapi dalam proses klaim dan pendaftaran peserta. Selain wawancara, observasi terhadap alur pelayanan dan dokumentasi arsip terkait juga digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan lapangan, memastikan bahwa informasi yang dihimpun bersifat holistik dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara akurat.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Informasi mentah yang diperoleh dari hasil rekaman wawancara dan catatan lapangan ditranskrip, kemudian dikodekan dan dikategorisasi berdasarkan tema-tema sentral seperti strategi sosialisasi, hambatan kepesertaan, dan sinergi antarlembaga. Pola-pola yang muncul dari analisis ini kemudian diinterpretasikan untuk membangun narasi deskriptif yang logis, menghubungkan temuan empiris dengan konsep implementasi kebijakan publik. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan keterangan dari petugas BPJS dengan pengelola proyek untuk memastikan konsistensi informasi, sehingga simpulan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dijadikan landasan rekomendasi perbaikan layanan di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Dinamika Kolaborasi Lintas Sektoral

Hasil analisis mendalam terhadap data lapangan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada

sektor jasa konstruksi sangat bergantung pada kekuatan sinergi antar-lembaga. BPJS Ketenagakerjaan, sebagai badan penyelenggara, menyadari posisi strategisnya yang hanya bertindak sebagai operator pelaksana, sehingga tidak memiliki wewenang penuh dalam penegakan kepatuhan tanpa dukungan regulator. Oleh karena itu, dibangunlah kerja sama fungsional yang erat dengan pemerintah daerah dan instansi teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Tenaga Kerja. Meskipun kerja sama ini tidak selalu dimanifestasikan dalam bentuk nota kesepahaman formal yang kaku, koordinasi di lapangan berjalan sangat intensif. Dinas PUPR berperan krusial dalam memastikan setiap proyek konstruksi telah mendaftarkan pekerjanya sebagai syarat administratif, sementara Dinas Tenaga Kerja berfungsi sebagai pengawas regulasi. Sinergi ini menciptakan ekosistem pengawasan berlapis yang memaksa pemberi kerja di sektor konstruksi untuk lebih patuh terhadap kewajiban perlindungan sosial bagi para pekerjanya.



Gambar 1. Hasil Pelaksanaan Observasi

Tujuan fundamental dari kolaborasi multipihak ini adalah untuk memastikan tercapainya perlindungan semesta atau *Universal Coverage Jamsostek* (UCJ) di wilayah tersebut. Sektor jasa konstruksi dikenal memiliki risiko kerja yang tinggi dengan karakteristik tenaga kerja yang bersifat harian lepas dan fluktuatif, sehingga rentan luput dari pendataan. Melalui kolaborasi yang terbangun, celah administratif ini dapat diminimalisir karena pendaftaran proyek menjadi prasyarat mutlak dalam proses tender maupun pelaksanaan konstruksi. Dampak positif dari sinergitas ini terlihat pada peningkatan grafik kepesertaan dari proyek-proyek pemerintah maupun swasta yang sebelumnya belum tertib administrasi. Selain memperluas cakupan perlindungan, kerja sama ini juga memperlancar proses verifikasi data saat terjadi klaim, karena data proyek telah terintegrasi atau setidaknya terkoordinasi dengan baik antar-instansi. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan internal operator, tetapi lebih pada bagaimana orkestrasi kebijakan dijalankan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.

## 2. Strategi Sosialisasi dan Penguatan Literasi

Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat, strategi sosialisasi yang diterapkan bersifat multi-level dengan memadukan pendekatan konvensional dan digital. Pendekatan tatap muka dilakukan dengan turun langsung ke perusahaan-perusahaan dan lokasi proyek untuk memberikan edukasi mendalam mengenai urgensi perlindungan jaminan sosial. Langkah ini dinilai sangat efektif untuk membangun hubungan emosional dan kepercayaan antara petugas dan peserta, serta memberikan ruang diskusi langsung terkait kendala teknis di lapangan. Di sisi lain, simbolisasi manfaat program menjadi taktik komunikasi yang sangat

ampuh. Kegiatan penyerahan santunan klaim JKK atau JKM yang dilakukan secara seremonial dan dipublikasikan dengan izin ahli waris berfungsi sebagai bukti sosial (*social proof*) yang nyata. Strategi ini mengubah persepsi masyarakat yang tadinya menganggap iuran BPJS hanya sebagai biaya hangus atau beban tambahan, menjadi sebuah investasi perlindungan yang memiliki nilai manfaat konkret dan sangat besar ketika risiko kerja benar-benar terjadi.

Selain metode konvensional, adaptasi terhadap era informasi dilakukan melalui penguatan literasi digital yang menyasar segmen pekerja lintas generasi, termasuk kelompok milenial dan Gen-Z yang mendominasi tenaga kerja baru. Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi mengenai prosedur, manfaat, dan testimoni peserta menjadi kunci untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan tersebar. Kombinasi antara sosialisasi langsung di lapangan dan kampanye digital ini menciptakan pertukaran informasi yang intensif, yang merupakan elemen vital dalam tata kelola kolaboratif. Masyarakat tidak hanya diberitahu tentang kewajiban hukum, tetapi diedukasi tentang hak-hak dasar mereka sebagai pekerja. Hasilnya, terjadi peningkatan kesadaran kolektif di mana pekerja mulai aktif menanyakan status kepesertaan mereka kepada perusahaan. Transformasi strategi komunikasi ini membuktikan bahwa edukasi yang konsisten dan bukti nyata pembayaran klaim adalah instrumen paling efektif untuk melawan stigma negatif dan meningkatkan kepuasan sukarela dari para pelaku usaha jasa konstruksi.

### **3. Identifikasi Hambatan Struktural dan Kultural**

Meskipun berbagai strategi telah dijalankan, penelitian ini mengungkap adanya hambatan signifikan yang berakar pada aspek kultural dan pemahaman masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil, rintisan (*startup*), dan sektor informal. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi jaminan sosial, di mana masih banyak persepsi keliru yang menyamakan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan, serta anggapan bahwa prosedur pengurusannya rumit dan berbelit-belit. Bagi sebagian pengusaha kecil, iuran jaminan sosial sering kali dipandang semata-mata sebagai beban operasional yang mengurangi margin keuntungan, bukan sebagai jaring pengaman yang melindungi aset perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Paradigma "biaya tambahan" ini menyebabkan resistensi pasif, di mana perusahaan cenderung menunda pendaftaran atau hanya mendaftarkan sebagian kecil pekerjanya. Kurangnya pemahaman mengenai besarnya risiko finansial yang harus ditanggung perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja tanpa asuransi menjadi titik lemah yang menghambat optimalisasi kepesertaan.

Di sisi lain, hambatan teknis dan administratif juga masih mewarnai proses implementasi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan ketertiban administrasi proyek. Seringkali terjadi keterlambatan pendaftaran tenaga kerja proyek konstruksi, padahal risiko kerja sudah mengintai sejak hari pertama pekerjaan dimulai. Ketidaklengkapan dokumen administrasi saat pengajuan klaim menjadi kendala klasik yang memperlambat proses pencairan manfaat, yang pada akhirnya memicu ketidakpuasan peserta. Selain itu, meskipun sistem digital seperti SIPP atau EPLKK telah dikembangkan, penggunaannya belum sepenuhnya merata di sektor konstruksi yang pekerjanya sangat dinamis, sehingga proses manual masih sering dilakukan. Hal ini menegaskan bahwa kesiapan sumber daya, struktur birokrasi, dan kapasitas pelaksana di lapangan memegang peranan vital. Kesenjangan antara sistem digital yang disediakan dengan kesiapan administratif pengguna jasa konstruksi menuntut adanya pendampingan yang lebih intensif dan penyederhanaan prosedur agar hambatan birokrasi tidak mencederai tujuan mulia perlindungan tenaga kerja.

### **4. Fleksibilitas Prosedur Klaim dan Layanan**

Mekanisme pelayanan klaim JKK dan JKM dirancang dengan prinsip fleksibilitas dan inklusivitas untuk memastikan hak peserta dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat. Untuk kasus kecelakaan kerja, peserta mendapatkan kemudahan akses melalui jejaring Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) yang telah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan klinik. Dalam skema ini, peserta yang mengalami kecelakaan hanya perlu menunjukkan kartu kepesertaan, dan pihak rumah sakit akan berkoordinasi langsung dengan BPJS untuk verifikasi dan penjaminan biaya, sehingga peserta tidak perlu mengeluarkan uang pribadi di awal. Namun, sistem juga tetap mengakomodasi mekanisme *reimbursement* bagi kejadian di daerah yang belum terjangkau fasilitas PLKK atau dalam kondisi darurat tertentu. Fleksibilitas ini menunjukkan komitmen penyelenggara untuk menempatkan keselamatan peserta sebagai prioritas utama di atas prosedur administratif yang kaku, memastikan bahwa pertolongan medis tidak terhambat oleh urusan birokrasi.

Sementara itu, prosedur klaim Jaminan Kematian (JKM) difokuskan pada kemudahan bagi ahli waris yang ditinggalkan. Proses pengajuan dirancang untuk dapat dilakukan secara langsung oleh keluarga inti dengan membawa dokumen kependudukan dan surat keterangan kematian yang valid. Petugas layanan berperan aktif dalam memverifikasi keabsahan ahli waris untuk memastikan manfaat jatuh ke tangan yang berhak. Meskipun persyaratan dokumen bersifat mutlak demi akuntabilitas, pendekatan pelayanan yang diterapkan bersifat empatik dan suportif, mengingat kondisi psikologis ahli waris yang sedang berduka. Adanya opsi layanan jemput bola atau pendampingan pengurusan berkas bagi kasus-kasus tertentu menunjukkan bahwa sistem pelayanan terus beradaptasi untuk menjadi lebih humanis. Dengan prosedur yang jelas namun tetap akomodatif terhadap berbagai situasi lapangan, program ini berhasil memberikan kepastian perlindungan ekonomi bagi keluarga pekerja, mewujudkan fungsi jaminan sosial sebagai bantalan ekonomi saat terjadi risiko sosial yang tidak diinginkan.

### Pembahasan

Analisis mendalam terhadap dinamika kolaborasi lintas sektoral menunjukkan bahwa keberhasilan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan ekosistem regulasi yang kuat. Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja terbukti menjadi instrumen pengawasan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan kontraktor. Pola kerja sama ini mentransformasi kewajiban jaminan sosial dari sekadar imbauan menjadi prasyarat administratif yang mengikat, sehingga menutup celah bagi perusahaan untuk menghindari tanggung jawab. Hal ini mengonfirmasi bahwa dalam sektor dengan karakteristik tenaga kerja yang rentan dan fluktuatif seperti konstruksi, intervensi pemerintah daerah melalui kebijakan perizinan menjadi variabel kunci yang menentukan cakupan perlindungan semesta atau *Universal Coverage Jamsostek*. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip behavioristik, di mana praktik langsung dan penguatan melalui respons positif dapat memperkuat hasil belajar dan perubahan perilaku (Permatasari & Isfianadewi, 2022; Utomo & Hidayah, 2024; Zumailah et al., 2022).

Strategi komunikasi yang menggabungkan pendekatan personal di lapangan dan kampanye digital terbukti efektif dalam merekonstruksi persepsi publik terhadap jaminan sosial. Transformasi pemahaman masyarakat dari melihat iuran sebagai beban menjadi investasi perlindungan adalah pencapaian signifikan dari metode sosialisasi yang berbasis bukti atau *evidence-based*. Publikasi penyerahan santunan secara transparan berfungsi sebagai validasi sosial yang kuat, memberikan pesan visual bahwa manfaat program adalah nyata dan aksesibel. Di era digital, perluasan kanal informasi ke media sosial juga berhasil menjangkau demografi pekerja muda yang sebelumnya kurang terpapar literasi jaminan sosial,

membuktikan bahwa adaptasi teknologi komunikasi adalah keharusan untuk meningkatkan partisipasi sukarela (Liska et al., 2025; Ridho et al., 2022; Setiawan et al., 2023; Susanti et al., 2023).

Namun, pembahasan ini juga menyoroti tantangan struktural yang masih persisten, terutama rendahnya literasi finansial dan jaminan sosial di kalangan pelaku usaha mikro dan sektor informal. Stigma bahwa prosedur klaim itu rumit dan iuran membebani arus kas perusahaan kecil masih menjadi hambatan psikologis utama. Ketidaktahuan akan risiko finansial yang lebih besar akibat kecelakaan kerja tanpa asuransi menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang serius. Hal ini mengimplikasikan bahwa sosialisasi di masa depan tidak cukup hanya bersifat informatif, tetapi harus lebih edukatif dengan pendekatan analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) yang sederhana agar dapat diterima oleh logika bisnis para pengusaha kecil (Purwaingsih et al., 2023; Wiska & Colin, 2021).

Dari sisi operasional, fleksibilitas prosedur klaim yang diterapkan menunjukkan pergeseran paradigma pelayanan publik yang semakin berpusat pada pengguna atau *user-centric*. Kemudahan akses melalui jaringan rumah sakit mitra (*PLKK*) dan penyederhanaan birokrasi klaim kematian merupakan respons adaptif terhadap kebutuhan mendesak peserta. Fleksibilitas ini sangat krusial dalam situasi darurat kecelakaan kerja, di mana kecepatan penanganan medis menjadi prioritas di atas kelengkapan administrasi awal. Pendekatan humanis dalam pelayanan klaim kematian juga memperkuat kepercayaan publik bahwa negara hadir melindungi warganya tidak hanya secara finansial, tetapi juga dengan empati (Khoren & Setyowati, 2023; Loganathan et al., 2020; Rafidatuddini & Izzati, 2025).

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada sektor jasa konstruksi di satu wilayah, sehingga generalisasi temuan ke sektor lain atau wilayah dengan karakteristik demografis berbeda perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, kendala teknis seperti ketidakstabilan sistem digital di daerah terpencil mungkin belum terpotret sepenuhnya. Meski demikian, temuan mengenai pentingnya integrasi data proyek dan tenaga kerja memberikan wawasan berharga bagi perbaikan tata kelola data ketenagakerjaan nasional. Hal ini menegaskan perlunya percepatan digitalisasi administrasi proyek konstruksi agar sinkronisasi data kepesertaan dapat dilakukan secara *real-time* (Chomistriana et al., 2024; Nuraeni et al., 2022).

Sebagai simpulan, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi daerah yang mewajibkan bukti kepesertaan jaminan sosial sebagai syarat mutlak dalam setiap tahapan termin pembayaran proyek, bukan hanya di awal kontrak. Implikasi praktis lainnya adalah perlunya pengembangan aplikasi *mobile* yang lebih ramah pengguna bagi pekerja sektor informal untuk mempermudah pendaftaran dan pembayaran iuran secara mandiri. Secara teoritis, studi ini memperkaya literatur kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, badan penyelenggara, pelaku usaha, dan masyarakat adalah model yang paling *resilient* dalam menjamin keberlanjutan program perlindungan sosial di negara berkembang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif yang mendalam, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi perusahaan jasa konstruksi di wilayah Karimunjawa Surabaya telah menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan, ditopang oleh strategi kolaborasi lintas sektoral yang solid. Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja berfungsi

sebagai mekanisme kontrol yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan kontraktor dalam mendaftarkan tenaga kerja proyeknya. Selain itu, pendekatan sosialisasi hibrida yang memadukan edukasi tatap muka dengan kampanye digital terbukti mampu meningkatkan literasi jaminan sosial, mengubah persepsi iuran dari sekadar beban biaya menjadi investasi perlindungan yang krusial bagi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan persisten yang menghambat optimalisasi program, terutama yang bersumber dari rendahnya pemahaman administratif di kalangan pelaku usaha kecil dan kendala teknis dalam pendaftaran tenaga kerja harian lepas yang fluktuatif. Hambatan birokrasi dan keterlambatan pelaporan data proyek sering kali menjadi titik lemah yang memperlambat proses klaim manfaat, sehingga mengurangi tingkat kepuasan peserta. Oleh karena itu, implikasi manajerial dari studi ini merekomendasikan perlunya intensifikasi pendampingan administratif bagi perusahaan skala kecil serta pengembangan sistem digital yang lebih terintegrasi dan ramah pengguna untuk mempermudah akses layanan. Secara keseluruhan, keberhasilan perlindungan tenaga kerja konstruksi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen kolektif untuk membangun ekosistem kerja yang sadar risiko dan responsif terhadap hak-hak pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, L., Setyowati, S. E., & Nurkolis, N. (2024). Dampak implementasi kebijakan PPPK guru di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(4), 1060. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3482>
- Anggriawan, R. (2020). Responding to Covid-19: Indonesian occupational health and safety policy for corporate compliance. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.21111/jihoh.v5i1.4669>
- Chomistriana, D., Mulyono, A. T., Najid, N., & Bagio, T. H. (2024). The impact of construction stakeholder's readiness and acceptance of technology on the success of Indonesian digital government transformation in construction sector. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(2), 841. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2024.1.003>
- Hanafi, A. S., Amaras, A. D., Istikowati, R., & Pradifta, R. A. (2025). Fishbone analysis terhadap kelolosan defect fabric strategi perbaikan pada manajemen gudang tekstil. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1223. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6506>
- Izyati, N. J., N.A., I. S. S. T., A., N. A., H., R. K., Aura, D., & D., A. R. (2023). The urgency of health insurance systems as safety education efforts for informal sector workers in garage. *Journal of Safety Education*, 1(2), 49. <https://doi.org/10.15294/jse.v1i2.76200>
- Khozen, I., & Setyowati, M. S. (2023). Managing taxpayer compliance: Reflections on the drivers of willingness to pay taxes in times of crisis. *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218176>
- Liska, U., Novaria, E., Farhat, F., Suhaila, S., & Yusuf, A. (2025). Penguatan kapasitas relawan bencana melalui Posko Pelatihan Pengetahuan Kebencanaan (PAS WACANA P3K) di Kabupaten OKU Selatan. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1380. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6925>
- Loganathan, T., Chan, Z. X., & Pocock, N. S. (2020). Healthcare financing and social protection policies for migrant workers in Malaysia. *PLoS ONE*, 15(12). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243629>

- Mayansara, A., Atnang, M., Dwiyanti, D., & Banudi, L. (2025). Risiko kecelakaan kerja: Perspektif pegawai terhadap implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. *Health Information Jurnal Penelitian*, 17(2), 176. <https://doi.org/10.36990/hijp.v17i2.1543>
- Nuraeni, Y., Rahmatika, N., Nuzula, F., & Nasution, F. A. P. (2022). Menciptakan layanan pengawasan ketenagakerjaan secara profesional, modern dan bermartabat berbasis teknologi digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(1), 181. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2022915595>
- Permatasari, D. I., & Isfianadewi, D. (2022). The strategy of health insurance-BPJS in efforts to increase JKN-KIS participation in business entity on the segment of workers receiving wage. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 11(7), 385. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i7.2049>
- Pratiwi, A., & Triwahyudi, P. (2020). Jaminan perlindungan yang berkeadilan bagi tenaga kerja difabel akibat kecelakaan kerja. *Bestuur*, 7(2), 66. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40407>
- Purwaingsih, A. I., Suseno, D. A., Royhaan, F., Hikmah, I. W., & Riskawati, Y. (2023). Peningkatan pengetahuan dan kemampuan UMKM dalam pembuatan Bisnis Model Canvas. *Jurnal Bina Desa*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i2.32320>
- Puspitasari, D., Kurniawan, R., Noer, Z., Mashudi, M., Nasichin, M., Effendi, P., Basid, A., & Nurhidayah, M. (2022). Legal protection against workers/labours who are not participants of Work Accident Guarantee Program. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 419. <https://doi.org/10.21070/pssh.v3i.143>
- Rafidatuddini, I., & Izzati, U. A. (2025). Budaya organisasi yayasan pendidikan: Kajian diagnostik dalam konteks organisasi pendidikan. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 395. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5744>
- Ridho, A., Sujud, M., & Aksan, N. I. S. M. (2022). The urgency of understanding digital literacy in the flow of digitalization of communication and information. *Qaulan: Journal of Islamic Communication*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.21154/qaulan.v3i2.4664>
- Setiawan, R., Tata, M. E., Siedik, N. K. A., Sundari, A., Yulistiani, S., Nursifa, F. S., Nurhidayanti, S., Rohayani, S., Azwardhi, M. Y., Buchori, N., Rifaldi, M., Saifurrahman, S., Putra, R., Ardiansyah, R., Hakim, L. L., Ibrahim, M. F. J., Nugraha, D., Nurhidayati, S. S. E., Agustin, N., & Ireland, N. A. (2023). Literasi digital sebagai peningkatan pemahaman masyarakat dengan door to door dan seminar. *Jurnal PkM MIFTEK*, 4(1), 18. <https://doi.org/10.33364/miftek.v4-1.1321>
- Silaban, R., Ghafur, H. S., Widiawaty, D., & Basir, S. (2023). Eliminating the gap of labor and social protection for the workers of platform-based transportation. *Yustisia Jurnal Hukum*, 12(2), 185. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.69344>
- Susanti, T., Anom, E., & Iswadi, I. (2023). Optimizing public communication in the digital era: A case study of the Ministry of Communication and Information Technology in Indonesia. *Channel: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 144. <https://doi.org/10.12928/channel.v11i2.468>
- Sutrisno, H. (2020). Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 78. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.670>

- Suwandi, F. R., & Wardana, D. J. (2022). Aspek hukum keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perlindungan dan keamanan kerja. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(1), 251. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.539>
- Utomo, A. S., & Hidayah, N. (2024). Peningkatan pengelolaan hipertensi pada lansia melalui edukasi terapi biji kacang hijau berbasis masyarakat di Desa Sumberporong, Kabupaten Malang. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 125. <https://doi.org/10.51878/community.v4i2.3325>
- Wiska, M., & Colin, J. J. (2021). Pengaruh tingkat pendidikan, pelatihan akuntansi, dan umur usaha terhadap pengguna informasi akuntansi pada UMKM dengan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating di Kabupaten Dharmasraya. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(2), 406. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.310>
- Yogama, C. D., Djunaidi, Z., & Rahmawati, F. F. (2022). Implementasi program pelaporan unsafe action & unsafe condition di PT XYZ. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 231. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v6i1.2933>
- Zubair, A. Z. A., & Yassir, M. Y. M. (2025). Analisis perubahan dinamika peran purna pekerja migran Indonesia perempuan dalam keluarga di Desa Dukuh Deompok perspektif hukum Islam. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 811. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6007>
- Zumailah, E., Nur, T., & Darmiyanti, A. (2022). Application of behavioristic learning theory in developing healthy life behavior for student. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(5), 6724. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.3848>